HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: KAMIS
05 NOVEMBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989

Didukung Kementerian PU, Dedy Hasriady Siapkan Perluasan Layanan Sampah Buton Selatan hingga Tahun 2028, Target 85 Persen Wilayah Terlayani



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menargetkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah mencapai 85 persen wilayah pada 2028. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada 2027 dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum, sekaligus memperluas jaringan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di sejumlah kecamatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton Selatan, Dedy Hasriady, mengatakan penguatan infrastruktur persampahan menjadi langkah penting untuk membangun sistem pelayanan yang terintegrasi. TPST kabupaten nantinya akan ditunjang fasilitas TPS3R yang berfungsi mengolah sampah dari lingkungan masyarakat sebelum masuk ke tahapan pengelolaan berikutnya.

Pada 2027, pemerintah merencanakan

Lanjut ke Hal: 7



Laporan: PRA-SETYO M, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- Kepolisian Resor (Polres) Baubau mengungkap kronologi kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Pasar Karya Nugraha, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 06.30 Wita. Dalam kasus tersebut, seorang lelaki berinisial MOL ditetapkan sebagai tersangka.

Kasat Reskrim Polres Baubau AKP Gayuh Pambudhi Utomo, S.Tr.K., S.I.K., melalui Kanit I Reskrim Polres Baubau, Ipda Muh. Fatih Zafran, menjelaskan, peristiwa bermula ketika tersangka MOL bersama dua rekannya sedang duduk di pasar karena mereka bekerja sebagai penjaga di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, korban Dhani datang bersama seorang temannya bernama Komang dan bergabung untuk

Lanjut ke Hal: 7

Baru Diguyur Hujan, Video Gedung RSUD Buton Utara Bocor, Mutu Bangunan dan Tanggung Jawab Disorot



Laporan: Kasrun

BURANGA, BP - Kondisi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Utara menjadi sorotan publik setelah sejumlah bagian gedung dilaporkan mengalami kebocoran dan rembesan air meski baru diguyur hujan. Peristiwa

Lanjut ke Hal: 7

Buton Tengah Siapkan Rp250 Juta untuk Beasiswa, Bupati Azhari Percepat Prodi STEM USN



Laporan: Ardi

BUTON TENGAHPemerintah Kabupaten Buton Tengah menyiapkan dukungan hibah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta beasiswa sekitar Rp250 juta untuk mempercepat pengembangan pendidikan tinggi berbasis Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) di Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka Kampus B Buton Tengah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan, perikanan, sains, dan teknologi untuk memperkuat ekonomi biru.

Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., mengatakan rekomendasi kementerian terkait pembentukan fakultas baru telah diterbitkan sekitar dua bulan lalu. Proses selanjutnya kini menunggu tahapan kelembagaan di tingkat universitas.

Dorongan tersebut disampaikan Azhari saat menghadiri Workshop Pengembangan Program Studi Berbasis STEM di Aula Lantai 4 USN Kolaka Kampus B Buton Tengah, Selasa (3/11/2026). Menurut dia, pengembangan program studi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pengembangan pendidikan tinggi berbasis STEM harus mampu menjawab kebutuhan daerah, terutama dalam pengelolaan potensi kelautan,

Lanjut ke Hal: 7

Porprov 2026, KSMI Baubau Siapkan 14 Atlet dan Harapkan Lapangan Khusus

Laporan: Prasetio

BAUBAU, BP- Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Kota Baubau menyiapkan 14 atlet untuk memperkuat kontingen daerah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) XV 2026 di Kota Kendari, Desember mendatang. Sebanyak 26 atlet telah mengikuti seleksi pada 30-31 Oktober 2026. Namun, di tengah persiapan menuju kompetisi tersebut, KSMI masih



menghadapi keterbatasan sarana latihan karena belum memiliki lapangan khusus sepak bola mini.

Pelatih KSMI Kota Baubau, Syawarudin, mengatakan penjaringan atlet dilakukan secara perorangan, bukan berdasarkan klub.

Lanjut ke Hal: 7

Yusril Tegaskan Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Ancaman Serius bagi Negara



Yusril respons kasus penyadapan Presiden Prabowo.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah perwira tinggi Polri menjadi persoalan serius yang menyangkut keamanan negara dan integritas institusi penegak hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kasus tersebut harus diusut secara objektif dan ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), setelah Presiden Prabowo menerima laporan dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai dugaan penyadapan terhadap dirinya.

Yusril menilai, penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah menteri tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Apalagi, tujuan serta kepentingan di balik tindakan tersebut belum sepenuhnya terungkap dalam proses penyidikan.

"Bayangkan seorang presiden di-intercept, disadap, bayangkan para menteri disadap, dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan. Itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara," kata Yusril.

Menurut Yusril, Presiden Prabowo telah meminta agar aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang diduga terlibat. Penanganan perkara juga harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan prasangka maupun kepentingan tertentu.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN); serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Sementara itu, satu perwira tinggi lainnya berinisial SU, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi, masih berstatus sebagai saksi. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Prabowo.

Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepada publik, dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan agar sejumlah nomor telepon dimasukkan ke perangkat penyadapan milik Polri tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang dipersyaratkan.

Kasus ini memiliki relevansi dengan pengalaman Indonesia pada 2013, ketika hubungan diplomatik Indonesia dan Australia sempat memanas menyusul pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, serta sejumlah pejabat pemerintah. Dokumen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap aktivitas intelijen Australia yang memantau telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Pemerintah Indonesia ketika itu menarik pulang duta besarnya dari Australia untuk berkonsultasi dan meninjau kembali kerja sama kedua negara.

Dalam sejarah internasional, persoalan penyadapan dan pengawasan komunikasi juga pernah menjadi bagian penting dari skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972. Kasus pembobolan dan penyadapan markas Partai Demokrat tersebut berkembang menjadi skandal politik yang menyeret Presiden Richard Nixon. Rekaman percakapan di Gedung Putih menjadi salah satu bukti penting dalam penyelidikan yang akhirnya mendorong Nixon mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974.

Dua peristiwa historis tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan teknologi pengawasan dapat berdampak jauh melampaui persoalan teknis. Selain menyangkut privasi dan keamanan komunikasi, praktik tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan publik, hubungan antarlembaga, hingga stabilitas politik dan hubungan diplomatik suatu negara.

Karena itu, pengungkapan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi momentum penting untuk mengevaluasi mekanisme pengawasan dan penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat negara. Penegakan hukum yang transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti diperlukan agar kasus tersebut dapat diungkap secara menyeluruh serta tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. (*)

Kapolri Suyudi Rombak Jajaran Polri, 264 Perwira Dimutasi dan Enam Wakapolda Berganti



Ilustrasi

Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Rotasi besar-besaran kembali dilakukan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memutasi 264 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen), termasuk mengganti enam Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) di sejumlah wilayah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Dari total personel yang masuk dalam daftar mutasi, sebanyak 224 orang tercatat dalam kategori promosi dan flat. Perubahan jabatan meliputi lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri hingga jajaran kepolisian daerah.

Enam posisi Wakapolda yang mengalami pergantian tersebar di Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Gorontalo. Perubahan ini menjadi bagian penting dari penataan kepemimpinan di tingkat kewilayahan.

Di Sumatera Barat, Kapolri menunjuk Kombes Pol. Dhani Kristianto menggantikan Brigjen Pol. Solihin. Sementara di Sulawesi Barat, jabatan Wakapolda dipercayakan kepada Brigjen Pol. Eko Suprihanto untuk menggantikan Brigjen Pol. Hari Santoso.

Pergantian berikutnya berlangsung di Papua Barat dengan penunjukan Brigjen Pol. Yohanes Agus Rijanto menggantikan Brigjen Pol. Sulastiana. Di Nusa Tenggara Barat, Brigjen Pol. Harry Kurniawan dipercaya mengisi jabatan Wakapolda menggantikan Brigjen Pol. Hari Nugroho.

Adapun di Lampung, Kapolri menunjuk Brigjen Pol. Singgamata untuk menggantikan Brigjen Pol. Sumarto. Sementara jabatan Wakapolda Gorontalo kini dipercayakan kepada Brigjen Pol. Laode Aries El Fathar menggantikan Brigjen Pol. Dedy Suhartono.

Rotasi tidak hanya menyentuh jajaran kewilayahan. Di tingkat Mabes Polri, jabatan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) kini dijabat Kombes Pol. Gatot Sujono. Adapun posisi Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri dipercayakan kepada Kombes Pol. Teguh Wibowo.

Selain pergantian tersebut, mutasi mencakup promosi pada jenjang Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.), Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol.), dan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.). Penataan juga meliputi penyesuaian nivelering jabatan serta sejumlah posisi strategis Kapolrestabes, Kapolrestro, dan Kapolresta. Dua personel Polisi Wanita (Polwan) turut memperoleh promosi, masing-masing pada jenjang Brigjen Pol. dan Kombes Pol.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi merupakan mekanisme normal dalam pembinaan organisasi dan pengembangan karier personel. Menurut dia, rotasi diperlukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di tengah perkembangan tantangan keamanan.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri. Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal," ujar Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).

Ia menambahkan, setiap jabatan mengandung amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan profesionalisme serta integritas. Para pejabat baru diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan solutif, sekaligus memperkuat orientasi pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif sejarah, penataan organisasi kepolisian di Indonesia telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Pada 1 Juli 1946, Djawatan Kepolisian Negara ditetapkan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, sebuah momentum yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Sementara dalam perkembangan reformasi, pemisahan Polri dari ABRI mulai diberlakukan pada 1 April 1999 melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999.

Secara internasional, perkembangan kepolisian profesional juga memiliki sejarah panjang. Inggris membentuk Metropolitan Police pada 1829 melalui reformasi yang dipelopori Robert Peel, dengan sistem kepolisian profesional dan terorganisasi secara terpusat. Sejarah tersebut memperlihatkan pentingnya pembenahan kelembagaan dalam menghadapi perubahan kebutuhan keamanan masyarakat. (*)

Koltim Sumbang 16 Persen Produksi Padi Sultra, Gubernur ASR Bidik Swasembada Pangan



Laporan: Lisna

KOLAKA TIMUR-Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama swasembada pangan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Dengan kontribusi sekitar 16 persen terhadap produksi padi provinsi, daerah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui modernisasi pertanian, penguatan irigasi, dan pembenahan infrastruktur pendukung.

Optimisme itu disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat menghadiri sekaligus membuka Panen Raya Padi Sawah di Desa Iwoikondo, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, Sabtu (31/10/2026). Panen raya tersebut tetap berlangsung di tengah kondisi kekeringan berkepanjangan yang melanda sejumlah wilayah.

Gubernur menilai capaian produksi Kolaka Timur perlu dipertahankan melalui dukungan pemerintah dan peningkatan kapasitas petani. Menurut dia, pertanian tidak cukup hanya mengandalkan luas lahan, tetapi membutuhkan pengelolaan profesional, pemanfaatan teknologi, serta infrastruktur yang mampu menjamin keberlanjutan produksi.

“Di tengah kondisi kekeringan yang berkepanjangan, sore ini kita masih bisa melaksanakan panen padi. Kita patut bersyukur atas capaian tersebut,” kata Andi Sumangerukka.

Ia menyoroti akses jalan menuju kawasan pertanian yang masih membutuhkan pembenahan. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diminta menuntaskan perbaikan infrastruktur sesuai kewenangan masing-masing agar distribusi sarana produksi maupun hasil panen petani berjalan lebih lancar.

Menurut Gubernur, peluang ekonomi sektor pertanian cukup besar apabila produktivitas lahan terus ditingkatkan. Dengan asumsi hasil panen sembilan ton gabah per hektare dan harga Rp7.200 per kilogram, petani berpotensi memperoleh omzet kotor sekitar Rp64,8 juta dalam satu kali panen, sebelum dikurangi biaya produksi. Ia mengilustrasikan, pengelolaan lahan seluas 30 hektare dapat memberikan peluang ekonomi yang lebih besar apabila dilakukan secara efektif.

Karena itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi pertanian dan pembangunan jaringan irigasi yang memadai agar frekuensi panen meningkat dari dua kali menjadi empat kali dalam setahun. Peningkatan indeks pertanaman tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan petani.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mengingatkan pemerintah daerah dan petani agar mengantisipasi perubahan cuaca ekstrem. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kekeringan yang terjadi pada tahun ini berpotensi diikuti curah hujan tinggi pada tahun mendatang sehingga meningkatkan risiko banjir. Ketersediaan penampungan air dinilai penting agar air hujan dapat disimpan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian saat musim kemarau.

“Berdasarkan data dari BMKG, tahun ini kita mengalami kekeringan, namun tahun depan diprediksi akan ada curah hujan tinggi yang berpotensi banjir. Oleh karena itu, mulai saat ini perlu dipersiapkan segala sesuatunya, termasuk penampungan air,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra, Muhammad Taufik, memaparkan dukungan pemerintah provinsi kepada petani Kolaka Timur selama 2025â€“2026. Pada 2025, bantuan mencakup benih padi untuk 5.999 hektare, benih jagung hibrida 1.378 hektare, pupuk padi untuk 3.640 hektare, dan pupuk jagung hibrida untuk 2.550 hektare. Pemerintah juga menyalurkan 202 unit hand sprayer, sekitar 12 unit alsintan berupa traktor roda dua dan roda empat, membangun jalan usaha tani sepanjang 250 meter, meningkatkan jalan usaha tani sepanjang 420 meter, serta menyalurkan 42.800 kilogram pupuk NPK dan 1.040 ekor ayam petelur beserta pakannya.

Pada 2026, bantuan kembali dialokasikan berupa sekitar 13 unit hand tractor, satu unit mesin panen, enam unit traktor roda empat, serta pembangunan jaringan irigasi tersier sepanjang 160 meter. Taufik mengapresiasi petani, kelompok tani, penyuluh, dan seluruh pihak yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian di Kolaka Timur. Ia berharap bantuan tersebut dapat memperkuat kapasitas produksi sekaligus menjadi dorongan bagi petani untuk terus mengembangkan usaha tani.

Upaya meningkatkan produksi padi di daerah itu juga memiliki relevansi dengan perjalanan ketahanan pangan nasional dan internasional. Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada 1984 setelah menjalankan berbagai program intensifikasi pertanian, pengembangan irigasi, dan penggunaan benih unggul. Catatan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menyebut pencapaian tersebut sebagai hasil komitmen panjang pemerintah dan kerja para pelaku sektor pertanian.

Pada tingkat global, perubahan besar produksi beras juga dipengaruhi perkembangan teknologi pertanian. International Rice Research Institute (IRRI) yang berdiri di Filipina pada 1960 memperkenalkan varietas padi unggul IR8 pada 1966. Varietas tersebut menjadi salah satu tonggak Revolusi Hijau di Asia karena mendorong peningkatan produktivitas melalui benih unggul, pemupukan, dan pengelolaan irigasi. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan produksi pangan membutuhkan kombinasi inovasi teknologi, dukungan infrastruktur, dan kebijakan yang berkelanjutan.

Panen raya di Desa Iwoikondo turut dihadiri Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sultra Jaelani, Penjabat Sekda Sultra, Sekda Kolaka Timur, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kolaka Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP-PKK Provinsi Sultra, jajaran pejabat Pemprov Sultra, Kepala BPS Sultra, Kepala Perum Bulog Sultra, camat dan kepala desa se-Kecamatan Loea, serta kelompok tani dan masyarakat setempat.(*)

Bombana Raih Juara Umum GEMARIKAN 2026, Gubernur Sultra Dorong Budaya Makan Ikan



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Kabupaten Bombana keluar sebagai juara umum Lomba Masak Serba Ikan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 2026 dalam rangkaian Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Kegiatan yang dibuka Gubernur Sultra Andi Sumangerukka di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sabtu (31/10/2026), sekaligus menjadi momentum mendorong peningkatan konsumsi ikan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Keberhasilan Bombana tersebut melengkapi prestasi TP PKK Kota Baubau yang meraih Juara II kategori menu keluarga sekaligus penghargaan Inovasi Menu Terbaik. Adapun Juara III diraih TP PKK Kabupaten Buton Selatan, Juara Harapan I TP PKK Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Juara Harapan II TP PKK Kabupaten Kolaka Utara. Sementara itu, TP PKK Kota Kendari memperoleh penghargaan Juara Favorit.

Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, peningkatan konsumsi ikan harus menjadi kebiasaan masyarakat, bukan sekadar gerakan seremonial. Ia meminta para orang tua memperkenalkan ikan kepada anak-anak sejak dini agar sumber pangan bergizi tersebut menjadi bagian dari pola makan keluarga.

“Ikan merupakan sumber pangan dengan kandungan gizi dan nutrisi yang tinggi. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri mengonsumsi ikan sebagai bagian dari menu sehari-hari,” ujarnya.

Menurut Gubernur, Sultra memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Sekitar 70 persen wilayah provinsi tersebut merupakan lautan, dengan produksi perikanan mencapai sekitar 43 ribu ton per tahun. Capaian itu menempatkan Sultra dalam empat besar daerah penghasil ikan di Indonesia.

Potensi tersebut, lanjutnya, menjadi alasan sektor agro-maritim ditetapkan sebagai salah satu dari empat pilar prioritas pembangunan daerah. Pemerintah daerah ingin memastikan kekayaan laut tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Karena itu, masyarakat diminta menjaga kebersihan laut dan tidak membuang sampah sembarangan agar kualitas lingkungan serta hasil tangkapan tetap terpelihara.

Ketua TP PKK Sultra, Arinta Nila Hapsari Andi Sumangerukka, mengatakan lomba masak menjadi sarana memperkenalkan kreativitas pengolahan ikan, udang, dan hasil laut lainnya. “Harapan saya, melalui lomba ini kita bisa mengolah sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya ikan, udang, dan hasil laut lainnya, dengan menghadirkan menu-menu baru yang lebih variatif,” katanya. Ia juga menganjurkan konsumsi ikan bagi anak-anak minimal empat hingga lima kali dalam sepekan untuk mendukung pertumbuhan dan kecerdasan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Hj. Hikmawaty, menjelaskan lomba tersebut diselenggarakan bersama TP PKK Sultra dan diikuti 10 tim penggerak PKK kabupaten/kota. Dalam laporannya, ia mengungkapkan Sultra memperoleh alokasi pembangunan 60 titik Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026, dengan progres pelaksanaan sekitar 50 persen. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan agro-maritim berbasis ketahanan pangan.

Rangkaian Harkannas 2026 juga diisi pembagian 50 paket produk olahan hasil perikanan kepada perwakilan nelayan, ibu hamil atau menyusui, serta remaja pranikah. Sebanyak 10 perwakilan masyarakat Desa Sorue Jaya menerima paket secara simbolis dari Gubernur bersama Ketua TP PKK Sultra, Pj. Sekda, dan Kepala DKP. Selain itu, terdapat bazar UMKM yang menampilkan sedikitnya 30 jenis produk olahan perikanan serta kegiatan Harmoni Bakar Ikan yang melibatkan 24 perwakilan nelayan dan masyarakat.

Kegiatan tersebut memiliki relevansi dengan sejarah peringatan Hari Ikan Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 pada 24 Januari 2014 dan diperingati setiap 21 November. Penetapan Harkannas dilatarbelakangi upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan gizi nasional melalui konsumsi ikan. Secara internasional, 21 November juga diperingati sebagai World Fisheries Day, yang berakar dari pertemuan organisasi nelayan dan pekerja perikanan dari 18 negara di New Delhi pada 21 November 1997 untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Gubernur bersama Pj. Sekda dan pejabat terkait meninjau Cold Storage Koperasi Cahaya Alam Bokori di kawasan KNMP Sorue Jaya. Peninjauan tersebut melengkapi agenda penguatan sektor perikanan, mulai dari peningkatan konsumsi, pengolahan produk, pemasaran, hingga penyediaan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan nelayan.(*)

Dua Pohon Jadi 820, Hugua Apresiasi Inovasi Pemuda Kembangkan Stroberi Batauga, Ciptakan Peluang Ekonomi



Laporan:Firman

BUTON SELATAN, BP- Inovasi pertanian berbasis kreativitas generasi muda mulai membuka alternatif pengembangan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Berawal dari dua pohon stroberi, kelompok petani bersama pemuda kreatif Bandar Batauga berhasil mengembangkan 820 pohon stroberi yang kini ditata menjadi kawasan agrowisata di pesisir pantai.

Potensi tersebut mendapat perhatian Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, saat mengunjungi Agrowisata Stroberi Bandar Batauga. Dalam kunjungan itu, Hugua melihat langsung perkembangan budidaya sekaligus mendengarkan pengalaman petani dan pemuda dalam membangun usaha pertanian yang menghadapi tantangan lingkungan pesisir.

Keberhasilan pengembangan stroberi tersebut tidak berlangsung secara instan. Kelompok petani melakukan serangkaian percobaan, mulai dari menyesuaikan media tanam, membangun sistem naungan, mengatur pengairan hingga mengendalikan hama. Langkah itu dilakukan untuk mengatasi kondisi lingkungan pantai yang memiliki karakteristik angin cukup kuat dan kelembapan tinggi.

Perkembangan dari dua menjadi 820 pohon juga memperlihatkan perubahan pendekatan masyarakat dalam mengelola potensi lokal. Budidaya yang semula berorientasi pada penanaman kini dikembangkan menjadi kegiatan wisata yang menggabungkan sektor pertanian, kreativitas anak muda dan promosi digital.

Keterlibatan generasi muda menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan kawasan tersebut. Mereka tidak hanya membantu pekerjaan di lahan pertanian, tetapi juga merancang konsep wisata petik stroberi, mengelola dokumentasi digital dan memperluas promosi. Pendekatan ini diharapkan mampu mempertemukan sektor pertanian dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hugua mengapresiasi kolaborasi antara petani dan pemuda yang dinilainya dapat menjadi contoh pengembangan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal. Ia menilai masyarakat di wilayah kepulauan memiliki peluang menciptakan sumber pendapatan baru melalui inovasi dan pemanfaatan sumber daya daerah.

“Ini adalah bukti nyata kearifan lokal, inovasi pemuda, serta kerja keras yang luar biasa. Berawal dari dua pohon, kini berkembang menjadi 820 pohon yang tertata menjadi taman stroberi di pesisir pantai,” kata Hugua.

Menurut dia, pengembangan agrowisata tersebut sejalan dengan semangat Kharisma Event Nusantara yang sebelumnya disampaikan dalam peringatan HUT Lakambau ke-20. Kreativitas pemuda diperlukan agar potensi alam dan budaya daerah tidak hanya menjadi daya tarik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat.

Secara historis, stroberi bukan tanaman asli Indonesia. Berdasarkan publikasi Pertanian Press Kementerian Pertanian, tanaman dari genus Fragaria tersebut mulai diperkenalkan ke Indonesia pada 1980-an dan dikembangkan lebih luas pada 1990-an. Produksi nasional tercatat mencapai 8.350 ton pada 2020, meningkat menjadi 9.860 ton pada 2021, kemudian mencapai 28.895 ton pada 2022. Data tersebut menunjukkan perkembangan komoditas stroberi dalam sektor hortikultura nasional.

Dalam sejarah internasional, stroberi modern (Fragaria Ã— ananassa) berkembang melalui persilangan alami dua spesies liar, yakni Fragaria virginiana dari Amerika Utara dan Fragaria chiloensis dari Amerika Selatan. Persilangan tersebut terjadi di Eropa pada awal abad ke-18 setelah tanaman stroberi asal Amerika dibawa ke kawasan tersebut. Perkembangan pemuliaan selama hampir tiga abad kemudian menghasilkan berbagai varietas yang dibudidayakan di berbagai belahan dunia.

Meski demikian, Hugua mengingatkan bahwa pengembangan Agrowisata Stroberi Bandar Batauga membutuhkan dukungan lintas sektor. Ia mendorong sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, lembaga kepemudaan, kelompok tani dan komunitas pemuda kreatif untuk memperkuat pengelolaannya.

Dukungan tersebut, lanjutnya, perlu diwujudkan melalui pendampingan teknis, peningkatan kualitas budidaya, akses pasar, promosi wisata dan pembinaan selama musim tanam. Langkah itu penting untuk menjaga kestabilan produksi sekaligus memastikan keberlanjutan kawasan agrowisata.

“Kisah dua pohon menjadi taman stroberi harus terus berlanjut. Ini bukan hanya tentang stroberi, tetapi juga tentang bagaimana pemuda Buton Selatan mampu mengubah pesisir menjadi pusat agrowisata yang membanggakan Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pengembangan Agrowisata Stroberi Bandar Batauga sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian di Buton Selatan. Namun, keberlanjutan usaha tetap membutuhkan penguatan teknologi budidaya dan pendampingan agar tanaman mampu berproduksi secara konsisten di tengah tantangan lingkungan pesisir. (*)

Buka Scout Rally 2026, Wabup Buton Utara Rahman Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter



Laporan: Kasrun

BUTON UTARA, BP- Sebanyak 34 Gugus Depan (Gudep) Pramuka dari lima kecamatan mengikuti Scout Rally 2026 tingkat Kabupaten Buton Utara yang dipusatkan di Lapangan Eks MTQ, Taman Hijau Minaminanga, Kecamatan Kulisusu, Kamis (29/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan karakter generasi muda agar memiliki mental tangguh, disiplin, keterampilan, dan jiwa bela negara.

Kegiatan yang mengusung tema "One Team, One Spirit, One Adventure" itu secara resmi dibuka Wakil Bupati Buton Utara, Rahman, S.KM., M.Kes. Pesertanya berasal dari Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Bone Gunu, dan Wakorumba Utara.

Dalam sambutannya, Rahman menekankan bahwa Gerakan Pramuka tidak sekadar menjadi kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Pendidikan kepramukaan dinilai mampu melengkapi pendidikan formal melalui pembentukan karakter, penguatan mental, serta pengembangan kemampuan sosial generasi muda.

"Gerakan Pramuka merupakan wadah pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk mental, fisik, serta karakter yang kuat, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda," ujar Rahman.

Ia menilai pembentukan karakter anak dan remaja tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pendidikan formal. Diperlukan keterlibatan keluarga dan organisasi kepramukaan agar proses pendidikan berlangsung secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.

Pesan tersebut sejalan dengan perjalanan panjang pendidikan kepramukaan di Indonesia. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan pada 14 Agustus 1961 melalui penyatuan berbagai organisasi kepanduan yang sebelumnya berkembang di Tanah Air. Sejak saat itu, Pramuka menjadi salah satu instrumen pendidikan nonformal untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab.

Secara internasional, gerakan kepanduan juga memiliki sejarah panjang. Gerakan ini berawal dari perkemahan percobaan yang diprakarsai Robert Baden-Powell di Pulau Brownsea, Inggris, pada 1907. Peristiwa tersebut menjadi tonggak perkembangan gerakan kepanduan dunia yang kemudian menyebar ke berbagai negara dengan penekanan pada pendidikan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Rahman berharap Scout Rally 2026 dapat memberikan pengalaman nyata kepada peserta melalui berbagai perlombaan dan aktivitas kepramukaan. Selain mengasah keterampilan, kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan semangat persaudaraan, kerja sama tim, sportivitas, serta tanggung jawab.

Ia juga meminta seluruh unsur organisasi kepramukaan di Buton Utara, mulai dari Majelis Pembimbing, pengurus kwartir, pelatih, hingga pembina, memperkuat koordinasi dan bekerja secara terpadu dalam membina anggota Pramuka.

"Seluruh jajaran Pramuka harus merapatkan barisan dan bekerja sama secara sinergis untuk mewujudkan generasi muda yang berkarakter, tangguh dalam berpikir dan bertindak, serta memiliki jiwa bela negara," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Buton Utara diharapkan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan kegiatan kepramukaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Rahman juga berharap Gerakan Pramuka semakin berkembang dan mampu mengambil peran dalam mendukung program pembangunan, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing.

Pembukaan Scout Rally 2026 turut dihadiri Kasdim 1429 Butur Mayor Inf. Hamka Sa'ad, Kasat Binmas Polres Butur Iptu L.M. Yusmar Umbo, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selaku anggota Majelis Pembimbing Cabang, Ketua Kwartir Cabang, jajaran pengurus Gerakan Pramuka, serta para pembina dan pelatih.(*)

13 Daerah di Sultra Penuhi Kriteria UHC, Pemprov Raih Satya JKN Awards 2026



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperoleh penghargaan Satya JKN Awards 2026 dari BPJS Kesehatan setelah dinilai memiliki komitmen dalam mendukung kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas capaian 13 kabupaten/kota di Sultra yang berhasil memenuhi kriteria Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama dan Madya.

Penghargaan itu diterima Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., yang mewakili Gubernur Andi Sumangerukka, pada puncak Satya JKN Awards 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026). Sultra menjadi satu dari empat provinsi penerima penghargaan bersama Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Capaian tersebut diperkuat data BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kendari per 27 Oktober 2026 yang mencatat 13 kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan UHC untuk penetapan UHC Award Tingkat Provinsi Sultra 2026. Tiga daerah masuk kategori Utama, yakni Konawe Kepulauan, Buton Utara, dan Konawe Utara. Sementara kategori Madya diraih Wakatobi, Bombana, Muna Barat, Kolaka Timur, Buton Selatan, Kolaka Utara, Kota Baubau, Konawe, Kolaka, dan Muna.

Penilaian UHC tidak hanya didasarkan pada banyaknya penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga memperhitungkan status kepesertaan aktif. Kategori UHC Utama mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 99 persen dari total penduduk dengan tingkat keaktifan sekurang-kurangnya 95 persen. Adapun kategori Madya menetapkan cakupan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan sedikitnya 85 persen.

Cakupan kepesertaan menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan keseluruhan penduduk di suatu daerah. Sementara tingkat keaktifan menunjukkan persentase peserta yang masih memiliki status aktif sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui Program JKN sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua indikator tersebut menjadi ukuran penting untuk memastikan perlindungan kesehatan tidak berhenti pada administrasi pendaftaran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa keberhasilan JKN harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari jumlah peserta, kepatuhan pembayaran iuran, hingga kesinambungan perlindungan. Dengan demikian, pemerintah daerah, pemberi kerja, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga keberlangsungan program tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan JKN merupakan instrumen negara untuk membangun masyarakat sehat sekaligus produktif. Menurut dia, jaminan kesehatan juga berperan mengurangi beban ekonomi keluarga ketika menghadapi kebutuhan pengobatan. "JKN adalah investasi produktivitas bangsa. Melalui proteksi yang diberikan oleh Program JKN, berobat kini tidak lagi harus mengeluarkan biaya mahal," ujarnya.

Muhaimin menambahkan, keberlanjutan JKN perlu ditopang semangat gotong royong dan keterlibatan berbagai pihak. Perlindungan kesehatan, kata dia, tidak hanya bermanfaat bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga mendukung produktivitas serta perekonomian masyarakat. Karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban kepesertaan dan pembayaran iuran menjadi bagian penting dalam menjaga sistem jaminan sosial.

Secara historis, Indonesia memulai babak baru jaminan kesehatan nasional pada 1 Januari 2014 ketika BPJS Kesehatan resmi beroperasi menyelenggarakan JKN. Pada tahap awal, program tersebut melayani sekitar 121 juta peserta atau setara 48 persen penduduk Indonesia. Sebelumnya, landasan sistem jaminan sosial nasional telah dibangun melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Di tingkat internasional, gagasan cakupan kesehatan semesta semakin menguat setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2012 mendorong UHC masuk dalam agenda pembangunan pasca-2015. Komitmen itu kemudian ditetapkan sebagai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 melalui target 3.8, yang menekankan perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan esensial berkualitas, serta ketersediaan obat dan vaksin yang aman, efektif, dan terjangkau.

Mengusung tema "Gotong Royong Melindungi Pekerja, Memperkuat Kesejahteraan Bangsa", Satya JKN Awards 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Bagi Sultra, penghargaan tersebut menjadi capaian sekaligus tantangan untuk mempertahankan kepesertaan aktif, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta memperluas perlindungan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.(*)

175 Wartawan Senior Jalani Pemeriksaan, Kemenkes Temukan Risiko Penyakit Serius



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- Pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) mengungkap sejumlah masalah kesehatan di kalangan wartawan lanjut usia. Dari 175 peserta berusia 60 tahun ke atas yang menjalani pemeriksaan di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (26/10/2026), ditemukan kasus hipertensi berat hingga katarak. Bahkan, seorang peserta memiliki tekanan darah mencapai 217/145 mmHg dan langsung dirujuk ke rumah sakit.

Ketua SWSI Wahyu Muryadi mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah wartawan senior membutuhkan penanganan medis lanjutan. Selain peserta dengan tekanan darah tinggi, beberapa orang diketahui mengalami katarak dan direncanakan menjalani pemeriksaan mata. Peserta yang memerlukan pelayanan lanjutan diarahkan ke puskesmas atau rumah sakit dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

Kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) tersebut menyediakan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, skrining risiko tuberkulosis (TB) dan hepatitis, serta deteksi dini penyakit jantung. Pemeriksaan IVA untuk mendeteksi kanker serviks dan konsultasi dokter secara gratis juga diberikan kepada peserta.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemeriksaan kesehatan tidak seharusnya dilakukan hanya ketika seseorang mulai merasakan gejala penyakit. Menurut dia, deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah risiko penyakit serius, seperti stroke, penyakit jantung, kanker, dan gangguan ginjal. "Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga orang tetap sehat, sebelum mereka sakit," ujar Budi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menghentikan konsumsi obat tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Selain menjalani pemeriksaan secara rutin, masyarakat perlu menjaga pola makan, mencukupi waktu tidur, dan berolahraga secara teratur.

Perhatian terhadap kesehatan pekerja jurnalistik juga mencakup aspek psikologis. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai tekanan pekerjaan dan pengalaman peliputan dalam situasi berat dapat memengaruhi kesehatan mental jurnalis. Karena itu, perusahaan media didorong menyediakan ruang pemulihan bagi wartawan setelah menjalankan tugas yang menguras fisik dan pikiran. Jurnalis juga diingatkan mengenali batas kemampuan diri, mengambil jeda ketika kewalahan, serta menjaga kebugaran melalui aktivitas fisik.

Persoalan hipertensi yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut sejalan dengan tantangan kesehatan masyarakat nasional dan global. Di Indonesia, Riskesdas 2013 mencatat prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah pada penduduk berusia 18 tahun ke atas sebesar 25,8 persen. Angka itu meningkat menjadi 34,1 persen pada 2018, kemudian tercatat 30,8 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 1,4 miliar penduduk dunia berusia 30-79 tahun mengalami hipertensi pada 2024. Sekitar 600 juta orang di antaranya belum mengetahui kondisi tersebut. Data historis ini menunjukkan bahwa hipertensi masih menjadi persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Salah seorang peserta, Boy Noya (63), mantan jurnalis dan presenter ANTV serta Metro TV, mengaku hasil pemeriksaannya secara umum baik. Ia hanya mendapati kadar kolesterol sedikit meningkat tanpa temuan lain yang mengkhawatirkan. Boy menjaga kebugaran dengan berlari dua hingga tiga kali seminggu dan bersepeda sekali seminggu, disertai pola makan sehat, tidur teratur, serta upaya mengendalikan stres.(*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post
www.baubaupost.com

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kasus Penyadapan Presiden, Server LIMS Diduga Digunakan Tanpa Prosedur Hukum, Mantan Kapolri dian Dua Jenderal Lainnya Ditahan



Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Perkara yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 itu tidak hanya menyasar nomor telepon kepala negara, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Berdasarkan hasil penyidikan, ketiganya diduga memerintahkan penyadapan tanpa memenuhi prosedur hukum. Penyidik menemukan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi, surat permohonan penyidik, maupun lampiran laporan polisi. Aktivitas tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana.

"Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep Safrudin.

Penyidikan juga mengungkap dugaan penghapusan file log atau catatan aktivitas penyadapan pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang sebelumnya berlangsung tanpa prosedur. Kasus ini kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri setelah adanya laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli. Satu saksi lainnya berinisial SU juga menjalani pemeriksaan. Polisi menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk. Ketiga tersangka selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara berdasarkan ketentuan KUHP baru dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di tengah proses hukum tersebut, Irwasum Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal itu merupakan tindakan individu dan bukan kebijakan institusi kepolisian. Ia menyatakan Polri memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tata cara penyadapan dengan memperhatikan prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta kepentingan penegakan hukum.

"Hal yang sedang didalami saat ini, murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," tegas Asep Edi Suheri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membenarkan Presiden Prabowo telah menerima laporan mengenai dugaan penyadapan tersebut dari Kapolri. Pemerintah menilai perkara ini memiliki dimensi serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara dan pejabat pemerintahan. Namun, berdasarkan pemeriksaan sementara, Yusril menyatakan belum ditemukan indikasi gerakan makar. Penanganan perkara diarahkan pada dugaan tindak pidana penyadapan, intersepsi, dan akses ilegal.

Pemerintah juga berencana mengevaluasi penggunaan perangkat penyadapan di lembaga negara. Evaluasi tersebut akan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dengan cakupan lembaga seperti Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar proses penyidikan berjalan profesional, objektif, dan transparan.

"Bayangkan seorang Presiden diintersep, disadap, bayangkan para menteri disadap, dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan. Itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara," ujar Yusril.

Persoalan penyadapan sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah hukum Indonesia maupun dunia. Pada 2010, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang karena tindakan tersebut berkaitan langsung dengan pembatasan hak privasi warga negara. Putusan itu juga menyoroti perlunya aturan yang komprehensif mengenai kewenangan dan tata cara penyadapan.

Di tingkat internasional, perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam mengawasi komunikasi publik menguat setelah pengungkapan dokumen intelijen Amerika Serikat oleh Edward Snowden pada 2013. Dokumen tersebut membuka perdebatan luas mengenai pengumpulan data komunikasi, pengawasan pemerintah, perlindungan privasi, dan mekanisme kontrol terhadap lembaga intelijen. Pengalaman tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam diskusi global mengenai keseimbangan antara keamanan negara dan hak privasi masyarakat.

Kasus yang kini ditangani Bareskrim Polri kembali menempatkan persoalan pengawasan komunikasi dan akuntabilitas penggunaan teknologi penyadapan sebagai perhatian publik. Selain pembuktian unsur pidana terhadap para tersangka, pengungkapan perkara ini juga akan menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan internal lembaga negara dalam memastikan kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar ketentuan hukum.(*)

Pemerintah Belum Tentukan Pengganti Listyo Sigit, Tugas KSP Bisa Diambil Alih Plt



Kepala KSP sekaligus mantan Kapolri Listyo Sigit jadi tersangka

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Pemerintah belum mengambil keputusan mengenai pengganti Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) setelah mantan Kapolri tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Untuk menjaga keberlangsungan tugas kelembagaan, pemerintah membuka kemungkinan penunjukan pelaksana tugas (Plt), termasuk dari unsur Sekretaris Utama KSP.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah belum membicarakan pergantian pejabat KSP. Menurut dia, perhatian pemerintah saat ini lebih diarahkan pada proses penegakan hukum atas perkara yang menyeret tiga perwira tinggi Polri tersebut.

"Belum sama sekali (pengganti dibahas), fokus dalam upaya penegakan hukum. Apalagi penetapan sebagai tersangka sudah dilakukan, penahanan sudah dilakukan, maka tentu ada Plt sementara, bisa juga Sestama," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Yusril menilai belum ditentukannya pengganti Listyo bukan persoalan yang harus segera menjadi perhatian utama. Ia meyakini mekanisme pemerintahan memungkinkan pelaksanaan tugas KSP tetap berjalan meskipun pejabat definitif belum ditetapkan.

"Tapi itu sabar saja lah, itu masalah enggak terlalu serius. Kita tahu bagaimana cara menangani soal-soal seperti ini," ujarnya.

Pergantian sementara tersebut menjadi penting karena KSP merupakan lembaga yang membantu Presiden dalam mengendalikan program-program prioritas nasional, mengelola isu strategis, serta memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan sesuai arahan kepala negara.(*)

Nongkrong Bersama di Pasar Karya Nugraha Baubau dan Diduga Dipicu Miras Hingga Tersinggung Dengan Pertanyaan Pernah Masuk Penjara, Pelaku Tunggal MOL Tikam Dhani Hingga Tewas

duduk bersama dan ngobrol, dimana tujuan awal korban dan temannya datang di Pasar Karya Nugraha untuk membeli nasi kuning.

"Setelah itu, dua rekan tersangka pergi, jadi hanya tersisa tiga orang, yakni MOL, korban Dhani, dan Komang," kata Fatih Zafran, dam sesi konferensi pers.

Selanjutnya kata Fatih Zafran, situasi kemudian memanas setelah korban dan temannya yang disebut baru saja mengonsumsi minuman beralkohol diduga melontarkan pertanyaan yang menyudutkan tersangka MOL mengenai pengalaman apakah pelaku sudah pernah dipenjara. Korban juga disebut menyentuhkan ujung rokok ke tangan tersangka hingga mengenai jari tangannya, sebelum berupaya memukul, tetapi tidak mengenai sasaran.

Emosi akibat kejadian tersebut, tersangka MOL kemudian pergi mencari kepala pasar untuk meberitahukan peristiwa yang baru saja dialaminya. Namun, dalam perjalanannya, tersangka menemukan sebuah warung yang memiliki pisau.

"Lalu tersangka mengambil pisau di warung tersebut, yang kini telah kami amankan sebagai barang bukti. Dalam kondisi emosi, MOL kembali ke TKP awal kemudian menyerang Dhani yaitu dengan menikam korban pada bagian dada kiri serta menyatat bagian leher dan melukai siku korban. Kemudian tang kepala Pasar dan melerai perkelahian itu dan kemudian meminta anak buahnya untuk membawa korban dhani ke RS Palagimata Baubau," jelas Ipda Muh Fatih Zafran.

Setelah menjalani perawata lebih lanjut, Lanjut Muh fatih Zafran, akhirnya pada pukul 22.30 WITA Dhani dinyatakan meninggal dunia. Polisi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka di wilayah Badia, dekat Keraton Buton, Kota Baubau. Atas perbuatannya, tersangka di kenakan pasal 466 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk kasus kriminal ini, Muh Fatih Zafran mengaskan pelakunya merupakan pelaku tunggal dan MOL sebelumnya tidak pernah terangkut masalah hukum.

sekedar diketahui bahwa pada malam hari kerabat dari korban dhani melakukan pembakaran ban di Kotamara Baubau, aksi itu menuntut agar aparat kepolisian segera menangkap pelaku.

Sementara itu, Wakapolres Baubau, Kompol Andi Usri, S.H., M.H., mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Baubau sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana kota tetap damai dan aman, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir.

"Kami berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini maupun permasalahan-permasalahan menonjol lainnya. Mari kita menjaga Kota Baubau agar tetap damai dan aman," ujarnya.

Polres Baubau mengingatkan masyarakat untuk menghindari tindakan yang dapat memicu konflik serta menyelesaikan setiap persoalan secara bijaksana dan melalui jalur hukum.(*)

Porprov 2026, KSMI Baubau Siapkan 14 Atlet dan Harapkan Lapangan Khusus

si, pihaknya akan menentukan 14 pemain sesuai ketentuan dan regulasi cabang olahraga sepak bola mini. Jumlah peserta meningkat dari 13 orang pada hari pertama menjadi 26 orang pada hari kedua setelah informasi seleksi semakin luas diketahui.

Seleksi tersebut dilaksanakan mengikuti batas waktu yang ditetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten/kota, yakni hingga 31 Oktober 2026. "Seleksi untuk semua cabang olahraga yang akan mengikuti Porprov batasnya sampai tanggal 31 bulan ini," kata Syawarudin, Sabtu (31/10/2026).

Setelah penjaringan rampung, KSMI Baubau merencanakan latihan rutin tiga kali dalam sepekan untuk meningkatkan kemampuan dan kekompakan pemain. Adapun pemusatan latihan atau training center (TC) secara terpusat masih menunggu ketersediaan anggaran. "Kita latihan dulu tiga kali seminggu. Kalau anggaran sudah masuk, baru kita adakan TC sentral," ujarnya.

Keterbatasan fasilitas menjadi persoalan yang diharapkan mendapat perhatian Pemerintah Kota Baubau. Selama ini, kegiatan latihan masih menumpang di lapangan sepak bola karena KSMI belum mempunyai fasilitas tersendiri. Syawarudin menilai lapangan khusus diperlukan agar proses latihan dan pembinaan atlet dapat berjalan lebih optimal. "Kami meminta dukungan dari pemerintah daerah, terutama lapangan. Sejauh ini kami belum memiliki lapangan tersendiri untuk sepak bola mini," ungkapnya.

Menurut Syawarudin, dukungan infrastruktur tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan persiapan Porprov 2026, tetapi juga menentukan keberlanjutan pembinaan atlet. Dengan fasilitas yang memadai, KSMI memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan pemain secara terstruktur sekaligus memperluas regenerasi atlet sepak bola mini di Baubau.

Secara kelembagaan, KSMI Kota Baubau mulai terbentuk pada Mei 2025, setelah organisasi KSMI berdiri di tingkat nasional pada Februari 2025. Pada Juni 2025, pengurus Baubau memperkenalkan organisasi tersebut dalam kegiatan di Kendari bersama sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Saat ini, kepengurusan KSMI Baubau telah terbentuk lengkap untuk mendukung program organisasi dan pembinaan atlet.

Perkembangan sepak bola mini di tingkat internasional juga menunjukkan terbukanya ruang kompetisi yang lebih luas. World Minifootball Federation (WMF) berdiri pada 2008 dan menyelenggarakan Piala Dunia Minifootball pertama pada 2015 di Amerika Serikat. Sejarah tersebut menjadi gambaran perkembangan sepak bola mini sebagai cabang olahraga kompetitif lintas negara. KSMI Baubau berharap pembinaan yang mulai dibangun di daerah mendapat dukungan fasilitas dan anggaran sehingga mampu melahirkan atlet berprestasi serta membawa nama Baubau ke tingkat yang lebih tinggi.(*)

Didukung Kementerian PU, Dedy Hasriady Siapkan Perluasan Layanan Sampah Buton Selatan hingga Tahun 2028, Target 85 Persen Wilayah Terlayani

pembangunan lima unit TPS3R, masing-masing tiga unit di Kecamatan Sampolawa dan dua unit di Kecamatan Batauga. Selain itu, DLH mengusulkan enam unit tambahan, yakni masing-masing dua unit di Kecamatan Siompu, Siompu Barat, dan Lapandewa. Setiap lokasi pembangunan harus menyediakan lahan minimal 200 meter persegi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga telah mulai memperluas pelayanan persampahan secara bertahap. Saat ini, lima kecamatan telah mendapatkan layanan secara bergilir, yakni Lapandewa, Sampolawa, Kadatua, Siompu Barat, dan Siompu Induk. Kecamatan Batauga dijadwalkan menjadi wilayah pelayanan berikutnya, disusul Kecamatan Batu Atas pada pekan selanjutnya.

"Komitmen kami adalah memastikan semakin banyak wilayah terjangkau layanan pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan," ujar Hasriady.

Ia menambahkan, keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dan kelurahan menjadi faktor penting dalam merealisasikan program tersebut. Kesiapan lahan minimal 200 meter persegi di setiap lokasi juga harus dipenuhi agar pembangunan TPS3R dapat berjalan sesuai perencanaan. "Kami berharap seluruh kepala dinas, sekretaris dinas, dan kepala bidang persampahan turut mendukung pelaksanaan program ini," katanya.

Rencana tersebut sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan sampah di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada 7 Mei 2008. Regulasi itu menegaskan pentingnya pengelolaan secara terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk pengurangan, pemilahan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah. Dalam konteks global, pendekatan serupa telah menjadi agenda internasional sejak Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, pada 1992 yang melahirkan Agenda 21 dan mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan.

Dengan pembangunan TPST dan perluasan jaringan TPS3R, Pemkab Buton Selatan berharap penanganan sampah tidak lagi hanya bertumpu pada pengumpulan dan pengangkutan, tetapi berkembang menjadi sistem pengurangan serta pengolahan yang lebih terstruktur. Target 85 persen cakupan pelayanan pada 2028 pun akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.(*)

Buton Tengah Siapkan Rp250 Juta untuk Beasiswa, Bupati Azhari Percepat Prodi STEM USN

perikanan, sains, dan teknologi,' demikian arah kebijakan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Selain menyiapkan dukungan anggaran dan beasiswa, pemerintah daerah berencana menghadirkan profesor serta pakar untuk memberikan kuliah umum secara berkala, khususnya pada bidang sains, matematika, dan fisika. Langkah ini diharapkan memperluas wawasan akademik mahasiswa sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran.

Pengembangan kampus juga diarahkan untuk mendukung sektor perikanan, termasuk potensi budi daya baby lobster. Pemkab Buton Tengah turut membuka peluang kerja sama dengan USN Kolaka dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan potensi unggulan daerah.

Upaya tersebut sejalan dengan perkembangan pendidikan STEM secara global. Secara historis, Amerika Serikat memperkuat pendidikan sains dan matematika setelah peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet pada 1957, yang mendorong perhatian besar terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, penguatan pendidikan vokasi, sains, dan teknologi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia untuk menghadapi transformasi ekonomi dan perkembangan industri.

Workshop ini dihadiri Rektor USN Kolaka Dr. Syarifuddin Tundreng, S.S., M.Pd., Anggota DPRD Buton Tengah Mutalib, perwakilan LLDIKTI Wilayah IX, APTIKOM, LAM PTIP, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala sekolah, perwakilan perbankan, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan. Pembahasan difokuskan pada penyusunan kurikulum dan program studi yang selaras dengan potensi kemaritiman, sumber daya lokal, kebutuhan industri, serta standar mutu pendidikan tinggi.(*)

Baru Diguyur Hujan, Video Gedung RSUD Buton Utara Bocor, Mutu Bangunan dan Tanggung Jawab Disorot

terekam dalam video dan viral di media sosial Facebook, Selasa (3/11/2026), itu memunculkan pertanyaan mengenai kualitas konstruksi, pengawasan pekerjaan, hingga tanggung jawab pemerintah terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Video kondisi gedung rumah sakit itu diunggah akun Facebook Sorotan Butur melalui grup Butur Perubahan. Pemilik akun mempertanyakan kondisi bangunan yang sudah mengalami kebocoran meskipun hujan disebut baru turun dalam waktu singkat. "Baru satu hari hujan. RS Buton Utara sudah keliatanmi bocornya. Apa ini tanggapannya untuk pemerintahan Buton Utara," tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Persoalan itu kemudian mendapat perhatian sejumlah pengguna media sosial, termasuk Sujono yang diketahui menjabat Wakil Ketua DPRD Buton Utara dari Partai Golkar. Ia menyampaikan keheranannya terhadap kondisi bangunan rumah sakit tersebut. "Allah.. kenapa bisa begitu," tulis Sujono. Akun Sorotan Butur kemudian kembali mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah terhadap kualitas bangunan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Kritik lebih keras disampaikan akun Facebook Herkules yang menyoroti kualitas pekerjaan kontraktor dan proses pemeriksaan bangunan sebelum diresmikan maupun difungsikan. "Booo parah itu kerja bagaimana itu kontraktornya, seharusnya pemerintah jangan dulu langsung resmikan bangunan seperti itu. Terlebih dahulu diperiksa semuanya dengan teliti di semua ruangan, atas bawah," tulisnya. Ia menduga pemeriksaan sebelumnya belum sepenuhnya memperhatikan kualitas konstruksi secara menyeluruh.

Sorotan terhadap kondisi RSUD Buton Utara tersebut mengingatkan kembali pentingnya standar keandalan bangunan publik di Indonesia. Sejak 16 Desember 2002, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur persyaratan penyelenggaraan bangunan sesuai fungsi dan kelayakannya. Ketentuan itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bangunan gedung harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya.

Dalam konteks internasional, perhatian terhadap keandalan fasilitas kesehatan juga semakin menguat setelah berbagai bencana besar memperlihatkan pentingnya rumah sakit tetap aman dan berfungsi dalam kondisi darurat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2006 menerbitkan pedoman evaluasi kerentanan fasilitas kesehatan terhadap gempa bumi. Prinsip tersebut menegaskan bahwa rumah sakit tidak hanya dituntut memiliki bangunan fisik, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan dan ketahanan untuk melindungi pasien, tenaga medis, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Meski demikian, kebocoran yang terlihat dalam video tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kegagalan konstruksi. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan penyebab rembesan, termasuk kemungkinan kerusakan lapisan atap, sambungan bangunan, sistem drainase, maupun faktor pemeliharaan. Sementara itu, media ini telah menghubungi Direktur RSUD Buton Utara, dr. Forta Nita, untuk meminta klarifikasi mengenai penyebab kejadian dan langkah penanganan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas pesan konfirmasi yang dikirimkan.

Pemerintah daerah dan manajemen RSUD Buton Utara diharapkan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bagian gedung yang mengalami kebocoran serta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kelayakan bangunan, mengetahui pihak yang bertanggung jawab, dan menentukan tindakan perbaikan agar persoalan serupa tidak mengganggu pelayanan maupun keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. (*)

Kamis, 05 November 2026 — BAUB AU POST — www.baubaupost.com

Ancaman Cuaca Ekstrem, Pemkot Baubau Instruksikan Camat dan Lurah Pantau Peringatan BMKG



Kadis Kominfo Baubau H Andi Hamzah Machmud, S.Sos, M.Si

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memperkuat langkah mitigasi bencana dengan menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah memantau perkembangan peringatan dini curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi potensi banjir, tanah longsor, dan banjir bandang sekaligus memastikan kesiapan penanganan darurat hingga tingkat kecamatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., mengatakan informasi peringatan dini BMKG harus menjadi dasar pengambilan langkah antisipasi oleh seluruh jajaran pemerintah. Atas arahan Wali Kota Baubau, informasi tersebut telah diteruskan kepada OPD, camat, dan lurah agar ditindaklanjuti sesuai kondisi wilayah masing-masing.

"Atas arahan Bapak Wali Kota Baubau, kami meneruskan informasi peringatan dini dari BMKG kepada seluruh OPD, camat, dan lurah. Kami minta agar informasi ini tidak hanya diketahui, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah kesiapsiagaan yang konkret," kata Andi Hamzah di Baubau, Sabtu (31/10/2026).

Pemkot Baubau meminta BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta kelurahan. Langkah yang harus dilakukan meliputi identifikasi kawasan rawan bencana, penyiagaan personel, penguatan kapasitas penanganan darurat, serta pemetaan kebutuhan respons apabila terjadi bencana.

Untuk mendukung langkah tersebut, BMKG menyediakan tiga skala informasi peringatan dini curah hujan. Pertama, peringatan dini cuaca jangka pendek atau nowcasting untuk mendeteksi potensi cuaca ekstrem dalam rentang 0-3 jam ke depan hingga tingkat kecamatan. Kedua, peringatan dini curah hujan harian yang mencakup prakiraan hingga tujuh hari ke depan dengan rincian wilayah kecamatan. Ketiga, peringatan curah hujan dasarian atau 10 harian dan bulanan untuk mengantisipasi potensi curah hujan tinggi pada skala kabupaten/kota.

Tingkat ancaman dalam informasi tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni WASPADA, SIAGA, dan AWAS. Klasifikasi ini menjadi pedoman untuk menentukan prioritas kesiapsiagaan berdasarkan potensi ancaman. Informasi juga diperbarui secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika cuaca dan iklim terkini.

Besarnya risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia menjadi alasan pentingnya penguatan sistem peringatan dini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.472 kejadian bencana sepanjang 2024. Dari jumlah tersebut, banjir mencapai 1.420 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 973 kejadian, cuaca ekstrem 733 kejadian, serta tanah longsor 207 kejadian. Bencana pada tahun itu mengakibatkan 540 orang meninggal dunia, 63 orang hilang, dan 11.531 orang mengalami luka-luka atau sakit.

Tantangan serupa juga menjadi perhatian dunia. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dalam laporan State of the Global Climate 2024 menyebut 2024 sebagai tahun terpanas dalam catatan pengamatan selama 175 tahun, dengan suhu rata-rata global sekitar 1,55 derajat Celsius di atas tingkat praindustri. WMO menekankan bahwa sistem peringatan dini dan layanan iklim berperan penting dalam melindungi masyarakat serta perekonomian dari dampak cuaca ekstrem.

Andi Hamzah mengingatkan masyarakat Baubau agar tidak hanya mengandalkan informasi dari media sosial yang belum jelas sumbernya. Warga diminta secara mandiri memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG, termasuk laman peringatan dini curah hujan di https://www.bmkg.go.id/peringatan-dini/curah-hujan/.

"Kami mengajak seluruh OPD terkait untuk mengidentifikasi wilayah rawan, menyiagakan personel dan kapasitas penanganan darurat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor," ujarnya.

Pemkot Baubau juga mengharapkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pengurus RT/RW, dan media massa berperan aktif menyebarluaskan informasi peringatan dini hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana dan melindungi keselamatan warga. (*)

Seleksi 31 Atlet, PERPANI Baubau Siapkan Regu Panahan Terbaik ke Kendari Untuk Hadapi Porprov 2026



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kota Baubau mulai mematangkan kekuatan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-XV tahun 2026 di Kota Kendari. Sebanyak 31 atlet telah mengikuti seleksi untuk memperebutkan tempat dalam kontingen, dengan penetapan atlet terpilih ditargetkan rampung dalam waktu sepekan.

Ketua PERPANI Kota Baubau, Muh. Ahadyat Zamani, S.T., M.T., mengatakan proses seleksi telah berlangsung selama satu hingga dua bulan terakhir. Penjaringan dilakukan untuk memastikan atlet yang dikirim memiliki kemampuan sesuai nomor pertandingan sekaligus peluang bersaing memperebutkan medali.

Seleksi mencakup sejumlah divisi, yakni standar nasional kelompok usia di bawah 18 tahun (U-18) dan di bawah 21 tahun (U-21), compound putra dan putri, recurve, serta barebow. Penilaian dilakukan berdasarkan perolehan poin dan disesuaikan dengan nomor yang akan dipertandingkan pada Porprov mendatang.

"Jumlah atlet yang mengikuti seleksi ada 31 orang. Kami masih menunggu hasil rekapitulasi poin serta mencermati keputusan mengenai nomor-nomor yang dilombakan. Dalam kurang lebih satu pekan ini, kami berharap sudah bisa menentukan atlet yang akan dikirim," kata Ahadyat, Sabtu (31/10).

Setelah komposisi atlet ditetapkan, PERPANI Baubau akan memasukkan mereka ke dalam program training center (TC). Program ini diarahkan untuk memperkuat tiga aspek utama, yakni kondisi fisik, kesiapan mental, dan penguasaan teknik. Ketiganya menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi.

Target peningkatan prestasi tersebut bertumpu pada capaian kontingen panahan Baubau dalam Porprov sebelumnya. Ketika itu, atlet Baubau berhasil membawa pulang satu medali emas dan dua medali perunggu. Hasil tersebut menjadi salah satu tolok ukur bagi pengurus dalam menyusun persiapan menghadapi kompetisi 2026.

Rekam jejak prestasi juga terlihat dalam sejumlah kejuaraan sepanjang 2022 hingga awal 2025. Atlet panahan Baubau tercatat mengikuti kompetisi tingkat regional Sulawesi Tenggara serta kejuaraan di luar daerah, antara lain di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Palu, Sulawesi Tengah. Sejumlah atlet bahkan pernah mengikuti seleksi untuk Pekan Olahraga Nasional (PON).

Secara historis, panahan merupakan cabang olahraga yang telah lama berkembang dalam kompetisi internasional. Federasi panahan dunia, World Archery, berdiri pada 1931, sedangkan panahan kembali masuk dalam program Olimpiade modern pada Olimpiade Munich 1972 setelah sebelumnya dipertandingkan pada beberapa edisi awal Olimpiade. Di Indonesia, pembinaan olahraga panahan berada di bawah organisasi PERPANI yang berdiri pada 12 Juli 1953. Perjalanan panjang tersebut memperlihatkan bahwa panahan membutuhkan pembinaan berkesinambungan, ketelitian, konsentrasi, dan konsistensi latihan.

Meski memiliki modal prestasi, pembinaan panahan di Baubau masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah atlet yang menekuni cabang olahraga tersebut. Ahadyat menilai perluasan minat masyarakat menjadi pekerjaan penting agar regenerasi atlet berjalan dan persaingan internal semakin kompetitif.

Dari aspek fasilitas, PERPANI Baubau kini telah menyiapkan lapangan untuk menunjang kegiatan latihan. Ketersediaan sarana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh atlet melalui peningkatan kedisiplinan dan intensitas latihan. Pengurus juga berupaya mengatasi berbagai kendala agar persiapan menuju Porprov tidak terhambat.

"Kami dari pengurus tentu akan berupaya mengatasi kendala yang ada. Salah satu kebutuhan utama adalah lapangan untuk berlatih, dan alhamdulillah sudah kami siapkan," ujar Ahadyat.

Dengan 31 atlet yang telah mengikuti seleksi, PERPANI Baubau kini memasuki tahap penentuan komposisi tim. Hasil seleksi dan program pemusatan latihan akan menjadi bagian penting dalam mengukur kesiapan kontingen untuk membawa nama Kota Baubau dan mengejar peningkatan prestasi pada Porprov Sultra 2026 di Kendari. (*)